

## SEKTOR MANUFAKTUR



Foto : Penenun mandiri yang memakai alat tenun tradisional (*walida*)

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor manufaktur produksi sutra Sulawesi Selatan diwakili oleh dua rangkaian kegiatan utama: pemintalan dan penenunan. Pada tahap pemintalan tampak kecenderungan bahwa kuantitas produksi kokon menurun dan kualitasnya belum bisa memenuhi standar kebutuhan pasar. Sementara itu, bantuan alat pemintal modern yang didatangkan badan pemerintah terkait belum diiringi oleh model pengelolaan yang bisa memastikan keberlanjutan operasinya dan meng-

untungkan petani. Pada tahap penenunan, upah penenun yang sangat rendah menyebabkan penenun yang seluruhnya adalah perempuan hidup dalam kemiskinan, dan menurunkan minat perempuan muda menjadi penenun. Sementara itu kebijakan pemerintah tampak belum menyentuh para penenun marginal ini, dan kekurangan dukungan data berkualitas untuk melihat persoalan dengan jernih. Sulit menghindari kesan bias gender dalam penetapan kebijakan untuk mendukung para penenun. Untuk mengatasi rentetan persoalan ini diperlukan,

perbaikan teknis dalam hal pengelolaan bantuan alat pemintalan modern, perbaikan kualitas metodologis dan manajemen data, serta program-program yang dapat memberdayakan para perempuan penenun.

## DARI DOMINASI BENANG IMPOR HINGGA RENDAHNYA UPAH PENENUN

*Policy Brief* ini merupakan bagian dari seri *Policy Brief* terkait rantai nilai sutra Sulawesi Selatan dengan judul '**Mengembalikan Kejayaan Sutra Sulawesi Selatan**', terdiri dari empat bagian:

1. Sektor Hulu,
2. Sektor Manufaktur,
3. Sektor Hilir, dan
4. Lintas Sektor.

Seri *Policy Brief* ini dirumuskan berdasarkan Kajian yang dilakukan Agustus 2020-Januari 2021 oleh Tim Pelaksana Kajian, sebagai bagian dari uji coba penyusunan kebijakan berdasarkan kajian atau *Knowledge to Policy* (K2P), kerja sama antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, *Knowledge Sector Initiative* (KSI), Yayasan BaKTI, dan Payo-Payo. Ada dua rangkaian kegiatan utama dalam sektor manufaktur sutra: pemintalan dan penenunan, dan kajian ini menemukan bahwa di setiap kegiatan utama ini, tampak beraneka masalah yang saling terkait, dari dominasi benang impor hingga rendahnya upah penenun. Rangkaian persoalan ini, dalam jangka panjang, bisa mengancam keberlanjutan tradisi panjang tenun sutra yang selama ini dilakoni dan diusung oleh para perempuan penenun Sulawesi Selatan.

## MASALAH DARI KOKON HINGGA ALAT PINTAL

► **Kuantitas produksi kokon menurun dan kualitasnya belum memenuhi kebutuhan pasar.** Jumlah produksi kokon lokal belum dapat memenuhi kebutuhan operasional enam alat pintal modern di Sulawesi Selatan, sehingga kini hanya tiga yang memproduksi secara terbatas, di bawah kapasitas produksi alat. Budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutra belum menghasilkan mutu kokon yang konsisten, seperti benang tidak rata atau mudah putus. Persoalan ini berkaitan langsung dengan masalah dari mata rantai sebelumnya, yaitu di sektor hulu (lihat *Policy Brief* Sektor Hulu).

► **Keterbatasan pemilikan alat membebani para pemintal.** Kokon yang tidak segera dipintal akan mempengaruhi kualitas benang, namun pelaku kecil sulit mengējarnya karena keterbatasan alat pemintal. Alat pemintal rakyat juga sulit mengejar kebutuhan pasar yang menginginkan produk sutra yang murah dan halus.

Dua persoalan di atas, di satu sisi mengakibatkan banyak pelaku pemintalan rakyat gulung tikar dan pengusaha pemintalan beralih ke usaha lain. Data yang tersedia di BPS menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 pemintal rakyat tersisa 26 unit, melorot jauh dari 255 unit usaha pemintalan rakyat pada tahun 2015. Unit usaha yang tersisa pun tidak beroperasi optimal karena susutnya ketersediaan



Foto : Pemasakan kokon

kokon. Ketika produksi kokon masih stabil para pemelihara ulat juga bekerja sebagai pemintal rakyat, pola ini turut menjelaskan penurunan usaha pemintalan rakyat.

Di sisi lain, terbatasnya kuantitas dan kualitas benang sutra lokal, serta relatif stabilnya permintaan, membuat volume benang impor jauh melampaui benang sutra produksi Sulawesi Selatan. Benang impor, sutra dan non-sutra, semakin mendominasi pasar tenunan<sup>1</sup>. Ketergantungan pada benang impor kemudian berdampak pada penenun mandiri dan/atau pengusaha tenun skala kecil (lebih jauh di bawah).

- ▶ **Bantuan alat pintal modern belum diiringi persiapan teknis dan sosial.** Bantuan alat pintal modern yang tahun 2021 ini akan dimobilisasi pemerintah provinsi belum diiringi model pengelolaan dan skema kerja sama yang bisa memastikan keberlanjutan operasinya dan menguntungkan petani sebagai produsen kokon. Upaya ini akan lebih berkualitas bila disertai bangunan kelembagaan yang siap dengan keahlian-keahlian untuk mengoperasikan alat tersebut.

<sup>1</sup>Wawancara toko benang sutra terbesar di Sengkang, Kabupaten Wajo.

## KETIMPANGAN DALAM RANGKAIAN KERJA PENENUNAN

### ► **Tingkat upah penenun sangat rendah.**

Di Kabupaten Wajo, pusat penenunan sutra Sulawesi Selatan, ada tiga jenis penenun: penenun kontrak/langganan, penenun pekerja, dan penenun mandiri (lihat KOTAK 1). Dua kategori penenun pertama rata-rata memperoleh Rp. 10.000 /hari. Upah penenun langganan dan pekerja, yang bekerja dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), jauh lebih rendah dibandingkan upah buruh tani, sekitar Rp. 50.000 /hari. Sementara para penenun mandiri, dominan memakai alat tenun tradisional (walida) dan menenun motif khas pesanan para pelanggan premium, rata-rata hanya memperoleh sekitar Rp. 25.000 /hari. Angka-angka ini jauh di bawah pendapatan para pengusaha tenun. Mereka rata-rata bisa menjual lebih dari satu sarung setiap hari dengan margin keuntungan Rp. 470.000 /lembar sarung sutra yang ditenun dengan ATBM dan Rp. 300.000 /lembar sarung sutra yang ditenun dengan walida. Rendahnya upah penenun langganan dan pekerja, yang membentuk mayoritas penenun sutra Sulawesi Selatan, merupakan persoalan utama di sektor manufaktur. Rendahnya upah membuat para perempuan penenun kesulitan meningkatkan taraf hidup, sehingga menggeser kerja menenun di Kabupaten Wajo menjadi pilihan terakhir, dan tak lagi menarik bagi perempuan muda

dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Industri tenun sutra Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kabupaten Wajo, ibukotanya dijuluki “Kota Sutra”. Sebelum dasawarsa 2000-an pelaku industri tenun sutra di Wajo mencapai ribuan orang, namun menurut data yang tersedia hanya tersisa 151 pelaku. Banyak dari mereka adalah perempuan kepala keluarga atau belum pernah menikah. Mereka mengalami marginalisasi dan rentan terhadap guncangan sekecil apa pun. Bila kecenderungan ini terus bertahan, dalam jangka panjang, Sulawesi Selatan akan kehabisan perempuan yang bersedia menjadi penenun.

► **Ketimpangan di level pengusaha.** Di level pengusaha, para pengusaha tenun berskala kecil, yang kebanyakan adalah penenun mandiri, menghadapi deretan isu yang berhubungan dengan penjualan seperti harga jual produk yang tertinggal di belakang peningkatan harga benang, dan permainan harga benang oleh pengusaha. Dua persoalan ini sering kali membuat mereka kesulitan bertahan.

Sementara para pengusaha tenun berskala besar lebih banyak menghadapi persoalan yang berhubungan dengan penenun langganan semisal (1) perebutan / pembajakan penenun langganan oleh pengusaha lain yang membayar upah sedikit lebih besar, (2) kesulitan memenuhi tenggat yang mereka janjikan kepada pembeli karena menurut mereka penenun “terlalu santai”, atau (3) penenun berhenti menenun karena berbagai alasan—terutama alasan keluarga.

Ini tak lepas dari peran tradisional perempuan yang menanggung beban ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah (bagi perempuan kepala rumah tangga).

Seluruh persoalan ini bermuara pada rendahnya upah yang memaksa para perempuan penenun meninggalkan pekerjaan bila mendapatkan pekerjaan lain atau sedang sibuk dengan urusan keluarga. Sebaliknya, menghadapi seluruh persoalan ini, para pengusaha besar punya cukup banyak modal untuk beralih usaha, atau beralih ke mekanisme produksi dan/atau membeli produk sutra (campuran) dengan

risiko penjualan lebih rendah. Sebagian besar pelaku industri tenun di Kabupaten Wajo telah mengganti bahan baku benang dan alat tenun: dari benang sutra asli yang lebih mahal dan berisiko, ke produk campuran sutra atau non sutra; dari alat tenun tradisional (walida) ke alat tenun semi modern (ATBM). Menurut data yang tersedia, pada tahun 2018, jumlah penenun sutra yang masih bertahan menggunakan walida tinggal sebanyak 33 penenun atau sekitar 21,85% dari total penenun di Kabupaten Wajo. Sementara sekitar 78% lainnya sudah menggunakan ATBM.

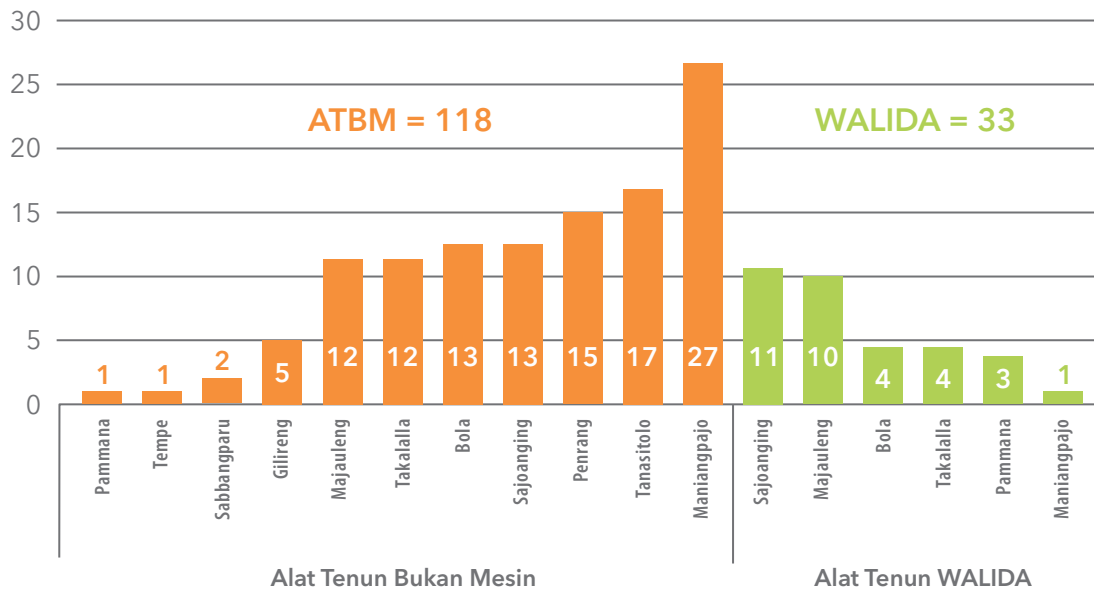
### KOTAK 1

## Jenis Penenun Menurut Posisi Sosial

Melihat posisi sosialnya, penenun di Wajo, Sulawesi Selatan, pada dasarnya ada tiga jenis. Penenun langganan/kontrak, penenun pekerja dan penenun mandiri.

- **Penenun langganan** adalah penenun yang menjadi langganan pengusaha tenun atau bos tertentu. Mereka bekerja atas pesanan pengusaha namun tidak bekerja di rumah pengusaha tersebut. Mereka menerima alat tenun bukan mesin (ATBM) dari bos langganan mereka yang ditempatkan di rumah sang penenun. Karena menggunakan ATBM (Bahasa Bugis, bola-bola), mereka juga dikenal sebagai *pattennung bola-bola* (penenun yang memakai bola-bola).
- **Penenun pekerja**. Penenun yang bekerja pada majikan, di tempat yang disediakan pengusaha yang menjadi majikan mereka, kadang tinggal di rumah majikan. Mereka sangat bergantung pada majikan (perlu pendalaman tentang kategori penenun ini, singkatnya durasi kajian menghambat penelusuran ini).
- **Penenun mandiri**. Penenun mandiri banyak memakai alat tenun tradisional (walida atau gedogan); tapi penenun dengan ATBM juga ada yang menjadi penenun mandiri. Penenun walida menentukan durasi pengerjaan pesanan, juga menentukan harga produk sendiri. Mereka melakukan seluruh proses penenunan setelah membeli benang sutra, sebagian hanya mengerjakan kain sutra asli. Ketika penenun bola-bola—yang menerima pesanan dari bos, pelan-pelan berpindah ke benang non-sutra, merekalah yang mempertahankan keberadaan tenun kain/sarung sutra asli. Mereka umumnya menenun selama satu sampai dua bulan untuk satu lembar sarung.

GRAFIK Sebaran Industri Tenun Sutra di Kabupaten Wajo, Tahun 2018



## INTERVENSI YANG KEHILANGAN SENTUHAN ATAS KENYATAAN

**Intervensi belum menyentuh penenun marginal.** Sulit menghindari kesan bahwa intervensi pemerintah belum kunjung menyentuh penenun langganan dan pekerja. Seluruh informan yang ditemui mengaku belum pernah menerima pelatihan atau bantuan lain. Tampak indikasi bahwa bantuan-bantuan hanya diakses penenun-penenun tertentu sehingga mayoritas penenun lain tampak termarginalkan.

**Kelemahan manajemen pengetahuan tentang penenunan.** Data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan kurang memadai. Di Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, misalnya, hanya ada data jumlah

penenun dengan kategori teknis (menurut alat yang digunakan dan lokasi). Belum ada data yang merangkum profil seluruh penenun, termasuk tingkat keterampilan dan akses terhadap bantuan dan pelatihan, serta dipilah menurut posisi sosial penenun (pekerja, kontrak, mandiri). Selain itu, Tim Kajian belum menemukan data tentang *outcome* dan *impact*, kealpaan yang berpotensi menyembunyikan kegagalan atau kelemahan program pada tahun-tahun sebelumnya. Karena seluruh penenun adalah perempuan, kealpaan ini mengisyaratkan hadirnya bias gender dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program badan pemerintah terkait.

## **REKOMENDASI: MEMPERBAIKI SEKTOR MANUFAKTUR SUTRA SULAWESI SELATAN**

### **1. Peningkatan mutu dan kuantitas produksi benang sutra lokal**

Perbaikan produksi dan mutu benang sutra lokal akan membatasi ketergantungan terhadap impor, membuka lapangan usaha baru, memoderasi kenaikan harga benang impor, dan memudahkan akses terhadap benang lokal bermutu sehingga menyokong perbaikan pendapatan penenun marginal. Untuk itu, diperlukan perbaikan kelembagaan pengelola mesin pintal bantuan. Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo dan Soppeng sebagai penerima alat bantuan, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Provinsi sebagai pemberi, dapat menyelenggarakan program-program berikut :

- Membentuk lembaga pengelola alat pintal bantuan.
- Pengadaan tenaga ahli tekstil yang menangani permasalahan pemintalan.
- Lembaga pengelola pemintalan menyiapkan mekanisme dan model pengelolaan alat pintal *full automatic* yang akan memastikan kestabilan pasokan kokon dan keuntungan bagi petani /pemintal.
- Pengorganisasian petani mitra. Upaya ini dapat dilakukan lewat kolaborasi dengan kelompok-kelompok petani terorganisir (lihat *Policy Brief* Sektor Hulu) sebagai produsen kokon, melalui serangkaian eksperimen kerja sama dan konsultasi kepada petani untuk menyiapkan skema suplai kokon yang paling menguntungkan bagi petani/pemintal dan paling sesuai dengan operasi mesin.

### **2. Perbaikan akses penenun terhadap program-program bantuan.**

Demi mengatasi timpangnya akses penenun langganan dan pekerja terhadap bantuan pemerintah, dibutuhkan perbaikan data penenun dan mekanisme penyelenggaraan program. Upaya ini dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Provinsi. Program-program yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- Mengembangkan instrumen yang mencakup informasi dasar berikut situasi ekonomi penenun (pendapatan dan belanja, jumlah produksi, pengusaha langganan,dst), sejarah akses bantuan /program pemerintah, dan dipilah berdasar posisi sosial (penenun pekerja, langganan, mandiri).
- Sensus terhadap seluruh penenun menyusul setelah perbaikan instrumen pengumpulan data.
- Hasil dari sensus ini, bersama data-data relevan lainnya, dapat digunakan untuk mengembangkan mekanisme penyelenggaraan program bagi penenun.

### **3. Perbaikan tingkat upah penenun.**

Demi mengatasi rendahnya upah penenun, dan mencapai tingkat pendapatan yang layak dibutuhkan tiga strategi:

- ▶ Pengorganisasian tenaga kerja per-tenunan untuk pemberdayaan. Strategi ini bisa dijalankan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Ornop lokal yang

berpengalaman memfasilitasi pengorganisasian perempuan lewat sejumlah program:

- Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok penenun berdasarkan tempat tinggal (untuk memudahkan proses kerja bersama).
  - Melakukan pelatihan-pelatihan bagi penenun agar terbiasa menjalankan pertemuan, serta mengelola kelompok dan usaha secara mandiri.
  - Melakukan penelitian bersama mereka dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), untuk merumuskan isu-isu nyata mereka, dan dari temuan yang terhimpun, menjalankan tindak lanjutnya secara bersama.
- ▶ Dengan kelompok-kelompok penenun yang terorganisir lewat strategi sebelumnya, dan tersedianya data yang lebih akurat dan komprehensif, bantuan kepada penenun sudah dapat disalurkan bagi penenun mandiri dan penenun langganan/kontrak.
- Program bisa berupa bantuan alat tenun (oleh Dinas Perindustrian Kabupaten) dan modal bagi penenun

terorganisir (oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten) agar bisa membentuk usaha secara kolektif guna meningkatkan posisi tawar di hadapan pengusaha tenun/pedagang skala besar. Bantuan-bantuan dalam bentuk pelatihan pun dapat disalurkan lewat kelompok-kelompok ini, bila mereka memintanya berdasarkan hasil diskusi di antara mereka.

- ▶ Khusus untuk mengatasi rendahnya upah para penenun pekerja, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha tenun. Program-program yang bisa diselenggarakan untuk strategi ini ialah:

- Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengusaha tenun besar yang mempekerjakan penenun, baik secara kontrak maupun upahan.
- Melakukan konsultasi/pertemuan tiga pihak, secara berkala untuk membicarakan persoalan upah sebaiknya setelah ada hasil dari pengorganisasian, berupa data dari PAR (lihat di atas), dan kemampuan bicara di hadapan publik.



Scan kode untuk  
mengunduh materi ini

**Penulis *Policy Brief* :** Nurhady Sirimorok

Policy brief dirumuskan dari Laporan Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan yang dilaksanakan atas kerja sama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Knowledge Sector Initiative (KSI), Yayasan BaKTI dan Payo-Payo.

**Tim Pelaksana Kajian :** Andi Sadapotto, Lusya Palulungan, Mahyuddin Riwu, Muhammad Alif K. Sahide, Nurhady Sirimorok, Syarif M. Parenreng dan Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (Yvonne M. Salindeho, Andi Fitriyani Yahya, Alsry Mulyani, Rosmala Dewi Said, Yuliana Rauf, Yossi F. Pratama).